



Sumadi, S.H., M.H.
PJ WALIKOTA YOGYAKARTA

Ir. Aman Yuradijaya, M.M.
SEKDA KOTA YOGYAKARTA

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

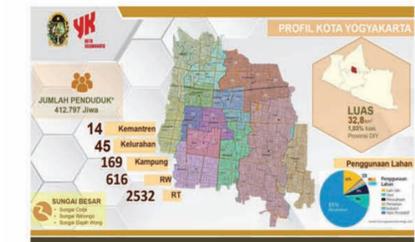
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Dalam Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian laporan tersebut adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. RLPPD ini disusun sebagai media pertanggungjawaban transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kinerja APBD Tahun 2022.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Yogyakarta terletak di antara 1100 24' 19" - 1100 28' 53" Bujur Timur dan antara 070 49' 26" - 07015' 24" Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta
*Ditindaklanjuti Kota Yogyakarta

Catatan : Luas Kota Yogyakarta 32,8 km² sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah **"Menguatkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Tinggi Untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan"**.

Visi ini secara sistematis menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dan dengan mendasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi, maka dirumuskan misi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.
- Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta dengan tujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta.
- Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketertarikan masyarakat Kota Yogyakarta.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
- Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan dengan tujuan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Membangun sarana prasarana publik dan permukiman dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman.
- Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

b. Prioritas Pembangunan Daerah

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2022, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2022 yaitu:

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;
- Peningkatan Perekonomian; dan
- Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bingkainya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY.

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari

berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kota Yogyakarta menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	87,18	87,69
2	Angka Kemiskinan	7,69%	6,62%
3	Angka Pengangguran	9,13%	7,18%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,16%	5,12%
5	Pendapatan per Kapita	102.413.476	112.501.234
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,464	0,519

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2022

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pada tahun 2022, nilai IPM Kota Yogyakarta adalah 87,69. Nilai tersebut menjadi Level IPM tertinggi menurut kabupaten/kota tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan masyarakat telah berangsur pulih menuju normal sebelum adanya Pandemi Covid-19.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022, data diolah

2. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan tertentu. Penentuan garis kemiskinan tersebut juga dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. Sampai pertengahan tahun 2021 Pemerintah masih membatasi kegiatan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 7,27% di tahun 2019 dan meningkat 0,42% di tahun 2020 menjadi 7,69%. Pada tahun 2022 kegiatan masyarakat berangsur - angsur mulai kembali seperti sebelum terjadinya pandemi dan persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan sebesar 1,07%, menjadi 6,62%. Hal ini menunjukkan target RPJMD dan Renstra tercapai. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah 4,72% dibandingkan dengan DIY dan juga lebih rendah 2,92% dibandingkan dengan nasional.



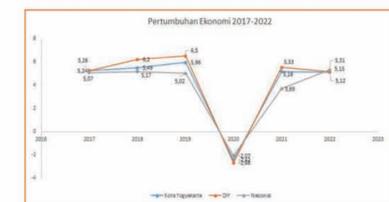
3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam penganggur. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Pada tahun 2022, TPT Kota Yogyakarta adalah sebesar 7,18. Jika dilihat dari target TPT Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 9,12-4,86, artinya sudah mencapai target. Jika dibandingkan dengan TPT Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar 9,13, maka TPT Kota Yogyakarta tahun 2022 mengalami penurunan. Beberapa faktor pendorong menurunnya TPT di Kota Yogyakarta adalah adanya upaya pemutakhiran data penganggur oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dimana data tersebut menjadi basis intervensi program kegiatan oleh perangkat daerah, selain itu juga dilakukan upaya penguatan lintas sektor berbasis proses bisnis serta sinergitas antar komponen 5K (Gandeng Gendong), yang didukung dengan pengembangan Jogja Smart Services serta penguatan inovasi perangkat daerah.



4. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah salah satunya diukur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,12 persen, menunjukkan sudah adanya mengalami perbaikan ekonomi sejak adanya pandemi covid-19 tahun 2020 yang mana pertumbuhan ekonominya negatif. Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi antara lain pelonggaran PPKM mendorong peningkatan mobilitas yang berdampak pada peningkatan aktifitas pariwisata; pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran khususnya peningkatan aktifitas mahasiswa di Kota Yogyakarta; Peningkatan realisasi investasi dengan proporsi terbesar pada sektor akomodasi dan makan minum selaras dengan pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum pada struktur ekonomi tahun 2022; dan kegiatan pengendalian inflasi yang dikoordinasikan oleh TPID secara berkelanjutan mampu menahan laju inflasi terutama untuk *volatile food*.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2023

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai pendapatan per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta menurut PDRB ADHB tahun 2022 sebesar Rp 112.501.000 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2023

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator Ketimpangan Pendapatan antar penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ditargetkan berada kondisi moderat dan lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya atau pada kisaran angka 0,382-0,464. Adapun realisasi nilai ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks gini mendasarkan data rilis BPS dalam Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2023 adalah sebesar 0,519.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2023

Nilai Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 0,519 berada di bawah nilai yang ditargetkan Renstra yaitu pada kisaran nilai 0,389 hingga 0,464. Kondisi ini menghasilkan capaian kinerja sasaran daerah sebesar 88,15%. Adapun nilai ketimpangan pendapatan yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa sebuah wilayah masuk kategori sangat timpang. Artinya peningkatan pendapatan 20% kelompok penduduk golongan yang berpenghasilan tinggi dan 40% kelompok penduduk golongan berpenghasilan menengah tidak mampu diikuti oleh 40% kelompok golongan yang berpenghasilan rendah. Sehingga tumbuhnya perekonomian Kota Yogyakarta pada tahun 2022, belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, utamanya penduduk golongan berpenghasilan rendah.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Indeks Gini Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 0,519 naik 0,55 poin. Nilai ini merupakan tertinggi sejak tahun 2017. Masih berpolihnya ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di tahun 2022 ditengarai masih menjadi kendala adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar.

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 SPM terdiri atas 6 (enam) bidang urusan yaitu: Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang

Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketrampilan dan Keterampilan Umum (Trantibum), dan Bidang Urusan Sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan SPM dan dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM sampai dengan triwulan 4 sebagai berikut:

a. Bidang Urusan Pendidikan

Sasaran SPM urusan pendidikan terdiri atas pendidikan dasar usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan SPM bidang pendidikan tahun 2022 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Utama 98%.



Pembelajaran mewarnai siswa PAUD

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2022

b. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2022 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Utama 98%.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sasaran SPM urusan pekerjaan umum terdiri atas penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum tahun 2022 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.



Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Air Limbah Domestik

Pembuatan IPAL Komunal



Kegiatan Uji Kualitas Air

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sasaran SPM urusan perumahan rakyat terdiri atas, penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat tahun 2022 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.

e. Bidang Urusan Trantibumlinmas

SPM urusan Trantibumlinmas dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang ketrampilan dan keterampilan umum (trantibum), bidang kebencanaan, dan bidang pemadam kebakaran. SPM bidang trantibum terdiri atas, pelayanan ketrampilan dan keterampilan umum. Sedangkan sasaran SPM bidang kebencanaan terdiri atas 3 sasaran yaitu, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kemudian sasaran SPM bidang pemadam kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelaksanaan SPM bidang trantibumlinmas tahun 2022 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.



Kegiatan Penegakan perda IMB

Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SD Negeri Sayidan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kota Yogyakarta, 2022

f. Bidang Urusan Sosial

Jenis pelayanan dasar bidang trantibumlinmas terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlarut diluar panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlarut diluar panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlarut diluar panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti;
- Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.

Pelaksanaan SPM bidang sosial tahun 2022 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%. Secara umum capaian SPM 6 (enam) Bidang Urusan Tahun 2022 di Kota Yogyakarta sebagai berikut, untuk Bidang Urusan Pendidikan 98%, Bidang Urusan Kesehatan 98%, Bidang Urusan Pekerjaan Umum 100%, Bidang Urusan Perumahan Rakyat 100%, Bidang Urusan Trantibumlinmas 100%, dan Bidang Sosial 100%.



Pemberian alat bantu Penyandang Disabilitas

Sumber: Dinas Sosial, 2022

Terhadap indikator SPM yang belum tercapai optimal, diperlukan koordinasi secara lebih intensif dengan melibatkan lintas sektor dalam rangka menginventarisir dan menentukan solusi penyelesaian kendala yang dihadapi. Selain itu koordinasi lintas sektor juga diperlukan dalam rangka penguatan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelaksanaan EPPD tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang Diterima Kota Yogyakarta Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Skor 3,4581 dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. Sedangkan untuk evaluasi tahun 2022 sampai dengan saat ini belum keluar hasilnya.



Terkait indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwilayah provinsi DIY. Hal ini menandakan Pemkot Yogyakarta telah mendapatkan predikat opini WTP untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut dan terbanyak di DIY. Prestasi tersebut diraih setelah LKPD Yogyakarta tahun anggaran 2022 diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DIY kepada Pj. Walikota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.



Keterangan: Kepala BPK Perwakilan DIY, Widhi Widayat, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pj. Walikota Yogyakarta, Sumadi S.H., M.H., pada tanggal 10 Maret 2023.

VI. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berikut adalah penjabaran realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.812.383.542.864,00	1.889.922.347.719,58	104,28
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58	114,41
PENDAPATAN TRANSFER	1.178.211.788.410,00	1.164.344.581.722,00	98,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
BELAJA DAERAH	2.049.712.899.206,00	1.826.804.253.746,60	89,12
BELAJA OPERASI	1.675.972.430.943	1.560.028.542.836,60	93,08
BELAJA MODAL	318.977.100.274,00	263.366.424.104,00	82,58
BELAJA TIDAK TERDUGA	53.932.523.099,00	2.518.441.916,00	4,67
BELAJA TRANSFER	870.844.890,00	870.844.890,00	100
PEMBIAYAAN DAERAH	237.329.356.342,00	238.344.608.962,89	100,43
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	328.741.356.342,00	329.756.608.962,89	100,31
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	91.412.000.000,00	91.412.000.000,00	100

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, Tahun 2022

VII. INOVASI DAERAH